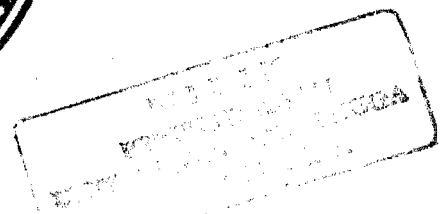


TRAVELLING SALESMAN.

KK  
Fis AN 21/04  
Adr  
d

**DILEMA RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA**  
( Study Deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Relokasi  
Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya )

**SKRIPSI**



Oleh :

**HENDRA NAKULO ADRIASMORO**  
NIM. 079815804

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2003**

**DILEMA RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA**  
**( Study Deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Relokasi**  
**Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan**  
**Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh**  
**Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Oleh :**

**HENDRA NAKULO ADRIASMORO**  
**NIM. 079815804**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2003**

# LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi

DILEMA RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Studi Deskriptif tentang Implementasi Kebijakan

Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya

telah memenuhi syarat dan siap untuk diujikan.

Surabaya, 11 Desember 2003

Dosen Pembimbing



Drs DIDID SOEPOJO Msi  
NIP. 131 289 507

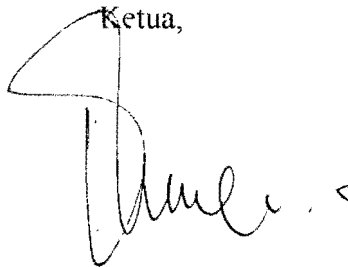
## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan didepan dewan penguji program studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 19 Desember 2003  
Pukul : 13.30 wib

Dewan penguji terdiri dari :

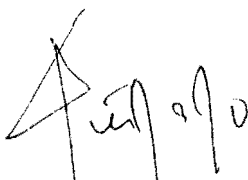
Ketua,



Drs Gitadi Tegas Supramudyo Msi

NIP. 131.569.363

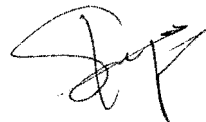
Anggota,



Drs Bintoro Wardianto Msi

NIP. 131.801.405

Anggota,



Drs Didid Soepojo Msi

NIP. 131.289.507

## ABSTRAKSI

Krisis telah memicu penderitaan dalam konteks makro, yaitu tidak saja bagi pelaku ekonomi besar, tetapi juga kelompok ekonomi menengah-kecil dan koperasi, serta terjadinya peningkatan kemiskinan. Ketika urbanisasi tak lagi dapat dibendung maka yang terjadi diberbagai kota besar biasanya adalah proses pemampatan (*involution*). Benar bahwa kehidupan di kota besar cenderung tak pernah ramah dan bahkan sangat keras. Akan tetapi, ibarat bilangan dalam ilmu matematika, daya toleransi dan kapasitas serap kota besar sepertinya tak pernah berujung alias tak terhingga. Siapa pun yang mencoba mangadu nasib di kota, niscaya akan disambut dengan tangan terbuka, sepanjang tidak mengharapkan pengakuan formal semacam KTP. Sektor informal menyeruak kepermukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung diluar sektor yang terorganisasi.

Dalam sebuah relokasi tentunya dibutuhkan persiapan yang matang dengan perhitungan dan pertimbangan yang cermat, supaya pelaksanaan relokasi itu sendiri berjalan dengan lancar. Dalam kasus ini sektor informal yang sudah termarginalkan sulit untuk menerima kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya, mereka beranggapan bahwa kebijakan itu hanya sekedar gusur menggusur saja, tanpa ada solusi terbaik bagi permasalahan sektor informal masalah pedagang kaki lima.

Dengan melihat pada beberapa hal diatas akan dapat diketahui mengapa kebijakan relokasi pedagang kaki lima banyak menemui hambatan dalam implementasinya, karena adanya dilema disini, yaitu disatu sisi mereka (para pedagang kaki lima) dilarang untuk berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan bagi pedagang kaki lima atau dengan kata lain dinyatakan liar, tapi dilain sisi keberadaan mereka dibutuhkan masyarakat sekitar, sebagai penyedia barang kebutuhan. Disisi yang lain juga keberadaan mereka ini sebagai alternatif pemecahan masalah pengangguran diperkotaan, sebagai akibat krisis yang melanda.

Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi dari pemkot atas suatu kebijakan, membuat mereka tidak melaksanakan kebijakan tersebut, meskipun kebijakan itu akan membuat mereka pada keadaan yang lebih baik.